

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2023



PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Provinsi Lampung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan, untuk digabungkan pada entitas pelaporan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung berupaya menyusun Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Hajimena, Januari 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung



YURNALIS, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690710 199003 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA PERANGKAT DAERAH

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasional (c) Neraca (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hajimena, Januari 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung



YURNALIS, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690710 199003 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2023.....	1
Laporan Operasional (LO) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2023.....	2
Neraca Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2023	3
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2023.....	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	6
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	6
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	7
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	8
BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	10
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
2.2. Hambatan dan Kendala Yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	12

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	13
3.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	13
3.2. Penjelasan pos-pos Neraca.....	18
3.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)	23
3.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	25
BAB 4. PENUTUP.....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Stock opname persediaan.
2. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Pada UPB Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Akhir Tahun Anggaran 2023.
3. Rekap Data Rekonsiliasi Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Lampung Akhir Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
4. Data Rekonsiliasi Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dari Belanja Modal Akhir Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
5. Rekap Data Mutasi Aktiva Tetap dari Droping Pusat/Droping Pemda/ Mutasi SKPD Lain/ Penghapusan/ Usulan Penghapusan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Akhir Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
6. Data Mutasi Aktiva Tetap dari Droping Pusat/Droping Pemda/ Mutasi SKPD Lain/ Penghapusan/ Usulan Penghapusan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Akhir Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
7. Laporan Rekapitulasi Penyusutan Tahun 2023
8. Rekening Koran 31 Desember 2023
9. Berita Acara Mutasi Barang Daerah
10. Data Beban Jasa Tahun 2023 (tagihan Listrik dan Telepon Bulan Januari 2023)

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 2.1 Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023
2. Tabel. 3.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022
3. Tabel. 3.1.1 Pendapatan Asli Daerah Anggaran Tahun 2023
4. Tabel. 3.1.1.A Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023
5. Tabel. 3.1.1.B Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023
6. Tabel. 3.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022
7. Tabel. 3.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022
8. Tabel. 3.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022
9. Tabel. 3.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022
10. Tabel. 3.2 Perbandingan Neraca Tahun Anggaran 2023 dan 2022
11. Tabel. 3.2.1.1. Rincian Persediaan
12. Tabel. 3.2.1.2.B1 Rincian Penambahan Peralatan dan mesin Akibat APBD TA 2023
13. Tabel. 3.3 Laporan Operasional TA 2023 dan 2022
14. Tabel. 3.3.1 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022
15. Tabel. 3.3.2 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022
16. Tabel. 3.4 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran 2023 dan 2023

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir Per 29 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Retribusi Daerah	-	-		
	Retribusi Jasa Usaha	12.780.000.00	4.000.000.00	31.30	223.420.000.00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-		-
	Bantuan Keuangan	8.399.845.000.00	7.151.999.000.00	85.14	9.918.491.000.00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	8.412.625.000.00	7.155.999.000.00	85.06	10.141.911.000.00
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	14.634.302.556.00	14.165.723.908.00	96.80	13.428.613.915.00
	Belanja Barang dan Jasa	18.275.426.146.36	16.712.609.207.00	91.45	20.899.820.337.00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				-
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Jumlah Belanja Operasi	32.909.728.702.36	30.878.333.115.00	93.83	34.328.434.252.00
	BELANJA MODAL				
	Tanah	-	-		
	Peralatan dan Mesin	1.171.284.400.00	1.135.160.000.00	96.92	3.768.437.481.00
	Gedung dan Bangunan	82.086.000.00	81.000.000.00	98.68	264.657.458.00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Aset Tetap Lainnya	20.000.000.00	20.000.000.00		
	Jumlah Belanja Modal	1.273.370.400.00	1.236.160.000.00	97.08	4.033.094.939.00
	JUMLAH BELANJA	34.183.099.102.36	32.114.493.115.00	93.95	38.361.529.191.00
	Surplus/Defisit Anggaran	(25.770.474.102.36)	(24.958.494.115.00)	96.85	(28.219.618.191.00)

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Untuk Periode yang Berakhir Per 29 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN - LO	7.155.999.000,00	10.141.911.000,00	(2.985.912.000,00)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.155.999.000,00	10.141.911.000,00	(2.985.912.000,00)	
Pendapatan Pajak Daerah - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.000.000,00	223.420.000,00	(219.420.000,00)	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	7.151.999.000,00	9.918.491.000,00	(2.766.492.000,00)	
PENDAPATAN TRANSFER - LO				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Bagi Hasil Pajak				
Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
BEBAN	30.878.333.115,00	35.634.330.462,00	(4.755.997.347,00)	(13,35)
BEBAN OPERASI	30.878.333.115,00	35.634.330.462,00	(4.755.997.347,00)	(13,35)
Beban Pegawai	14.165.723.908,00	13.428.613.915,00	737.109.993,00	5,49
Beban Persediaan	3.998.980.224,00	7.145.774.800,00	(3.146.794.576,00)	(44,04)
Beban Jasa	6.528.932.256,00	9.592.327.505,00	(3.063.395.249,00)	(31,94)
Beban Pemeliharaan	2.010.209.662,00	1.293.127.177,00	717.082.485,00	55,45
Beban Perjalanan Dinas	4.174.487.065,00	4.174.487.065,00	-	-
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial	-			
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Transfer				
Beban Lain-lain	-			
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
SURPLUS / (DEFISIT) DARI OPERASI - LO	(23.722.334.115,00)	(25.492.419.462,00)	1.770.085.347,00	(6,94)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASI				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
SAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/(DEFISIT)-LO (59+64)	(23.722.334.115,00)	(25.492.419.462,00)	1.770.085.347,00	(6,94)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NERACA**

Untuk Periode yang Berakhir Per 29 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022
2		
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Beban dibayar di muka		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar TPTGR		
Piutang Lain-lain		
Persediaan	7.837.700,00	13.186.850,00
JUMLAH ASET LANCAR	7.837.700,00	13.186.850,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP		
Tanah	1.287.711.266,00	1.287.711.266,00
Peralatan dan Mesin	14.092.548.692,00	10.010.407.692,00
Gedung dan Bangunan	13.661.252.077,00	13.394.492.077,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.343.263.800,00	2.343.263.800,00
Aset Tetap Lainnya	242.946.600,00	242.946.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan	(11.003.871.906,00)	(11.003.871.906,00)
JUMLAH ASET TETAP	20.623.850.529,00	16.274.949.529,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain	114.326.400,00	114.326.400,00
Penyusutan aset lain-lain	(38.599.950,00)	(38.599.950,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	75.726.450,00	75.726.450,00
JUMLAH ASET	20.707.414.679,00	16.363.862.829,00

	Utang Bunga		
	Pendapatan Diterima Dimuka		
	Beban yang masih harus dibayar	89.777.421,00	29.146.869,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	89.777.421,00	29.146.869,00
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	89.777.421,00	29.146.869,00
	EKUITAS	20.622.986.408,00	16.366.690.885,00
	JUMLAH EKUITAS	20.622.986.408,00	16.366.690.885,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20.712.763.829,00	16.395.837.754,00
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan			

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

	No.	URAIAN	2023	2022
	1	Ekuitas Awal	15.663.398.433.00	16.366.690.885.00
	2	Surplus/Defisit LO	(24.186.523.252.00)	(18.266.935.331.00)
	3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
3.1.1.2.1	4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
3.1.1.2.2	5	Selisih Revitalisasi Aset Tetap	-	-
3.1.1.2.3	6	Lain-lain (Koreksi Ekuitas lainnya)	-	-
			-	-
3.1.7.1.1		RK PPKD/(RKSKPD) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	28.219.624.191.00	17.563.642.879.00
	7	Ekuitas Akhir	19.696.499.372.00	15.663.398.433.00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung kami sajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan memuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- f. Menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- h. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
- 3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
- 4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
 - b. Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas

akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

5. Penjelasan atas informasi nonkeuangan SKPD.
6. Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar **Rp.8.412.625.000,00** yang terdiri dari Retribusi Jasa Usaha sebesar **Rp.12.780.000,00** dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp.8.399.845.000,00**. Sedangkan Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar **Rp.7.155.999.000,00** atau **85,06%** yang terdiri dari Retribusi Jasa Usaha sebesar **Rp.4.000.000,00** atau **31,30 %** dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp.7.151.999.000,00**. atau **85,14 %**.
 - b. Anggaran Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar **Rp. 34.183.099.102,36** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 32.909.728.702,36** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.273.370.400,00**. Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar **Rp. 32.114.493.115,00** atau **93,95 %** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 30.878.333.115,00** atau **93,83 %** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.236.160.000,00**. atau **97,08 %**.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023 terbagi menjadi 34 kegiatan yang terdiri dari :

Tabel. 2.1
Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
T.A 2023

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN			SISA PAGU ANGGARAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PENUNJANG				
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.150.261.202,36	32.084.903.115,00	93,95	2.065.358.087,36
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.330.817.152,36	21.615.574.182,00	96,80	715.242.970,36
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.780.000,00	128.997.250,00	82,81	26.782.750,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	91.025.950,00	91,03	8.974.050,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.280.000,00	21.936.000,00	65,91	11.344.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000,00	16.035.300,00	71,27	6.464.700,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.709.302.556,00	14.223.523.708,00	96,70	485.778.848,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.634.302.556,00	14.165.723.908,00	96,80	468.578.648,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.952.000,00	38.898.400,00	81,12	9.053.600,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.048.000,00	18.901.400,00	69,88	8.146.600,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.990.500,00	28.750.500,00	99,17	240.000,00
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.670.500,00	15.506.500,00	98,95	164.000,00
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.320.000,00	13.244.000,00	99,43	76.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.732.900,00	262.110.000,00	95,41	12.622.900,00
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.526.000,00	43.710.000,00	91,97	3.816.000,00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227.206.900,00	218.400.000,00	96,12	8.806.900,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.342.432.949,90	2.232.923.506,00	95,32	109.509.443,90
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.484.200,00	36.484.200,00	100,00	0,00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.175.000,00	55.175.000,00	100,00	0,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.367.600,00	10.367.600,00	100,00	0,00
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.996.500,00	29.996.500,00	100,00	0,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
16	Penyediaan Bahan/Material	109.775.600,00	109.775.600,00	100,00	0,00

17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.007.636.449,90	1.898.212.006,00	94,55	109.424.443,90
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.997.600,00	12.912.600,00	99,35	85.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.524.500,00	1.266.020.000,00	97,35	34.504.500,00
20	Pengadaan Mebel	74.000.000,00	58.000.000,00	78,38	16.000.000,00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.064.446.500,00	1.047.570.000,00	98,41	16.876.500,00
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.078.000,00	160.450.000,00	99,00	1.628.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.960.900,00	1.360.835.556,00	97,76	31.125.344,00
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.584.800,00	715.906.456,00	99,35	4.678.344,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.376.100,00	644.929.100,00	96,06	26.447.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.127.092.846,46	2.112.413.662,00	99,31	14.679.184,46
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.484.000,00	173.484.000,00	100,00	0,00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.170.000,00	151.170.000,00	100,00	0,00
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.802.438.846,46	1.787.759.662,00	99,19	14.679.184,46
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.819.444.050,00	10.469.328.933,00	88,58	1.350.115.117,00
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.730.744.950,00	1.461.186.074,00	84,43	269.558.876,00
28	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	1.730.744.950,00	1.461.186.074,00	84,43	269.558.876,00
	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	10.088.699.100,00	9.008.142.859,00	89,29	1.080.556.241,00
29	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	43.747.900,00	36.570.000,00	83,59	7.177.900,00
30	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	246.971.100,00	180.993.600,00	73,29	65.977.500,00
31	Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	319.075.600,00	168.097.000,00	52,68	150.978.600,00
32	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	35.300.000,00	0,00	0,00	35.300.000,00
33	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	9.325.924.500,00	8.523.472.859,00	91,40	802.451.641,00

34	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	117.680.000,00	99.009.400,00	84,13	18.670.600,00
		34.150.261.202,36	32.084.903.115,00	93,95	2.065.358.087,36

2.2 Hambatan dan Kendala Yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, terdapat sejumlah kendala yaitu sub kegiatan yang capaian indikator kinerja dibawah 80%, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan realisasi 68,35% dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 37,19%. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena dari 135 calon peserta uji kompetensi, terdapat 46 orang calon peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi/pemberkasan oleh Ditjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, sehingga hanya 54 orang peserta saja yang dapat mengikuti uji kompetensi. Adapun target 35 orang peserta uji kompetensi dari setoran kabupaten/kota tidak dapat terakomodir disebabkan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional yang dituju, belum di akomodir dalam dokumen analisis jabatan/analisis beban kerja masing-masing kabupaten/kota. Dari 54 orang tersebut hanya 50 orang peserta yang lulus uji kompetensi

Kendala lainnya adalah adanya kegiatan yang bersumber pada kegiatan setoran kabupaten kota yang tidak terlaksana, Sehingga realisasi anggaran pada sub kegiatan tersebut tidak maksimal maksimal.

BAB III

PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 2 Januari s.d 29 Desember 2023. Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenisnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.412.625.000,00	7.155.999.000,00	85,06	10.141.911.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.780.000,00	4.000.000,00	31,30	223.420.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.399.845.000,00	7.151.999.000,00	85,14	9.918.491.000,00
BELANJA	34.183.099.102,36	32.114.493.115,00	93,95	38.361.535.191,00
Belanja Operasi	32.909.728.702,36	30.878.333.115,00	93,83	34.328.440.252,00
Belanja Pegawai	14.634.302.556,00	13.428.619.915,00	91,76	13.428.619.915,00
Belanja Barang dan Jasa	18.275.426.146,36	20.899.820.337,00	114,36	20.899.820.337,00
Belanja Modal	1.273.370.400,00	1.236.160.000,00	97,08	4.033.094.939,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.171.284.400,00	1.135.160.000,00	96,92	3.768.437.481,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.086.000,00	81.000.000,00	98,68	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
Surplus/(Defisit)	(25.770.474.102,36)	(24.958.494.115,00)	96,85	(28.219.624.191,00)

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah **Rp.7.155.999.000,00** atau **85,06%** dari Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp.8.412.625.000,00** rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3.1.1
Pendapatan Asli Daerah Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.412.625.000,00	7.155.999.000,00	85,06	10.141.911.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.780.000,00	4.000.000,00	31,30	223.420.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.399.845.000,00	7.151.999.000,00	85,14	9.918.491.000,00

A. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah **Rp. 4.000.000,00** atau **31,30%** dari Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp.12.780.000,00** yaitu pendapatan dari retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Alat.

Realisasi tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya ruangan dan alat yang tersewa lagi.

Tabel. 3.1.1.A
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	4.000.000,00
2	Retribusi Pemakaian Alat	0,00
	JUMLAH	4.000.000,00

B. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah **Rp.7.151.999.000,00** atau **85,14%** dari Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp. 8.399.845.000,00** yaitu pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari :

Tabel. 3.1.1.B
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Penerimaan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator	52 Orang	884.000.000,00
2	Penerimaan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	38 Orang	556.434.000,00
3	Penerimaan untuk Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS	910 Orang	4.786.600.000,00
4	Penerimaan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	45	1.032.525.000,00
	JUMLAH	996 Orang	7.259.559.000,00

Pendapatan transfer tidak memenuhi target dikarenakan beberapa diklat tidak memenuhi jumlah peserta sesuai dengan yang ditargetkan.

3.1.2. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah **Rp. 30.878.333.115,00** atau **93,83%** dari Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp.32.909.728.702,36** rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3.1.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	32.909.728.702,36	30.878.333.115,00	93,83	34.328.440.252,00
Belanja Pegawai	14.634.302.556,00	13.428.619.915,00	91,76	13.428.619.915,00
Belanja Barang dan Jasa	18.275.426.146,36	20.899.820.337,00	114,36	20.899.820.337,00

3.1.2.1. Belanja Pegawai

Pagu Anggaran Untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp.14.634.302.556,00** sedangkan realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp.13.428.619.915,00** atau **91,76%** dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.1.2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	14.634.302.556,00	14.165.723.908,00	96,80	13.428.619.915,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.478.825.958,00	6.041.612.014,00	93,25	6.351.463.915,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.849.836.598,00	7.841.514.394,00	99,89	6.799.380.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	305.640.000,00	282.597.500,00	92,46	277.770.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	14.634.302.556,00	14.165.723.908,00	96,80	13.428.619.915,00

3.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Pagu Anggaran Untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp. 18.275.426.146,36** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 16.712.609.207,00** atau **91,45%** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang	4.369.050.649,90	3.998.980.224,00	91,53	7.145.774.800,00
Belanja Jasa	7.683.911.800,46	6.528.932.256,00	84,97	9.592.327.505,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.024.396.846,00	2.010.209.662,00	99,30	1.293.127.177,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.198.066.850,00	4.174.487.065,00	99,44	2.868.590.855,00
JUMLAH	18.275.426.146,36	16.712.609.207,00	91,45	20.899.820.337,00

3.1.3. Belanja Modal

Pagu Anggaran Untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp.1.273.370.400,00** sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp.1.236.160.000,00** atau **97,08%** dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.171.284.400,00	1.135.160.000,00	96,92	3.768.437.481,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.086.000,00	81.000.000,00	98,68	264.657.458,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
JUMLAH	1.273.370.400,00	1.236.160.000,00	97,08	4.033.094.939,00

3.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Komposisi Neraca per 29 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2.
Perbandingan Neraca Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NAMA PERKIRAAN	29-Des-23	31-Des-22
Aset	20.712.763.829,00	20.712.763.829,00
Aset Lancar	13.186.850,00	45.161.775,00
Aset Tetap	20.623.850.529,00	16.274.949.529,00
Aset Lainnya	75.726.450,00	75.726.450,00
Kewajiban	89.777.421,00	89.777.421,00
Kewajiban Jangka Pendek	89.777.421,00	29.146.869,00
Ekuitas	20.622.986.408,00	20.622.986.408,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.20.712.763.829,00** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.13.186.850,00**, Aset Tetap sebesar **Rp.20.623.850.529,00**, Aset Lainnya sebesar **Rp.75.726.450,00**. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.89.777.421,00** yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.20.622.986.408,00**.

3.2.1. ASET

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.2.1.1 Aset Lancar	13.186.850,00	45.161.775,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 29 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel. 3.2.1.1
Rincian Persediaan

No.	Nama Barang	Tahun 2023 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	5.556.850
2.	Persediaan Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering)	3.495.000
3.	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.695.000
4.	Persediaan Cetak dan Penggandaan	1.440.000
Jumlah		13.186.850

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.2.1.2 Aset Tetap	20.263.850.529,00	16.274.949.529,00

Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2022. Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 tersebut antara lain :

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A. Tanah	1.287.711.266,00	1.287.711.266,00

Merupakan saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.1.287.711.266,00**. Yang merupakan tanah bangunan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Hajimena Km. 13 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas Jumlah **86.404 m²**.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
B. Peralatan dan Mesin	14.092.548.692,00	10.010.407.692,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp.4.082.141.000,00**

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
C. Gedung dan Bangunan	13.661.252.077,00	13.394.492.077,00

Merupakan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 yang terletak di Jalan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Saldo gedung dan bangunan pada tahun 2023 ada penambahan asset sebesar **Rp.266.760.000,00**.

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
D. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.328.662.500,00	2.328.662.500,00

Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 yang terletak di Jalan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2021 saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami kenaikan.

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
E. Aset Tetap Lainnya	242.946.600,00	242.946.600,00

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 yang terletak di Jalan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2022 saldo aset tetap lainnya tidak mengalami kenaikan.

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
F. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	(9.959.550.456,00)	(9.959.550.456,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.(9.959.550.456,00)**. Saldo tersebut hasil laporan keuangan *audited* Tahun 2023.

Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi berdasarkan hasil *Berita Acara Rekonsiliasi Aset Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Pada Badan Pengembangan Sumber Daya*

Manusia Daerah Provinsi Lampung Akhir Tahun Anggaran 2023

Nomor : sebesar **Rp.25.417.921.019,00**.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.2.1.3. Aset Lainnya	75.726.450,00	75.726.450,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.75.726.450,00** saldo Aset Lainnya Tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Akumulasi Aset Lainnya merupakan penyusutan akun Aset lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan kenaikan/penurunan kapasitas dan manfaat Aset hasil Audited BKP RI.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.2.1.4. Ekstra Countable	312.076.686,00	312.076.686,00

Merupakan saldo Ekstra Countable per 31 Desember 2021 yang terletak di Jalan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2021 Ekstra Countable tidak mengalami perubahan.

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Tabel. 3.3 Laporan Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	Saldo 2023	Saldo 2022
Pendapatan - LO	10.141.911.000,00	10.141.911.000,00
Pendapatan Retribusi - LO	4.000.000,00	139.509.000,00
Pendapatan Transfer - LO		
Lain-lain PAD yang sah - LO	7.151.999.000,00	7.374.451.000,00
Beban	30.878.333.115,00	34.328.434.252,00
Beban Operasi	30.878.333.115,00	34.328.434.252,00
Beban Pegawai	14.165.723.908,00	12.671.358.163,00
Beban Barang dan Jasa		
- Beban Persediaan	3.998.980.224,00	4.231.311.972,00

- Beban Jasa		6.528.932.256,00	6.098.592.365,00
- Beban Pemeliharaan		2.010.209.662,00	394.540.000,00
- Beban Perjalanan Dinas		4.174.487.065,00	1.340.771.381,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		0,00	1.044.321.450,00
Beban Lain-lain			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI		(23.722.334.115,00)	(24.186.523.252,00)
OPERASI-LO			
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM		(23.722.334.115,00)	(24.186.523.252,00)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASI-LO		(23.722.334.115,00)	(24.186.523.252,00)

3.3.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp. 14.165.723.908,00** dan **Rp. 13.428.613.915,00**. Realisasi Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar **(737.109.993,00)**, Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

3.3.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.20.899.820.337,00** dan **Rp.18.275.426.146,36**. Realisasi Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar **Rp.2.624.394.190,64**. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan entitas.

Tabel. 3.3.2

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban Barang dan Jasa	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Beban Persediaan	4.369.050.650	7.145.774.800
Beban Jasa	7.683.911.800	9.592.327.505
Beban Pemeliharaan	2.024.396.846	1.293.127.177
Beban Perjalanan Dinas	4.198.066.850	2.868.590.855
Jumlah	18.275.426.146	20.899.820.337

3.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Tabel. 3.4.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

ADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 29 Desember 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	17.433.079.887,00	17.069.983.337,00
SURPLUS/DEFISIT LO	- 25.770.474.102,36	- 24.186.523.252,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revitalisasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain (Koreksi ekuitas lainnya)	-	-

3.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 29 Januari 2023 adalah sebesar **Rp.17.433.079.887,00**.

3.4.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp.(25.770.474.102,36)** dan **Rp.(24.186.523.252,00)** Jumlah 29 Desember 2022 merupakan selisih kurang pendapatan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

3.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 tidak ada.

3.4.4. Kewajiban Untuk di Konsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk di Konsolidasikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp.25.770.474.102,36** dan **Rp.24.186.523.252,00**. merupakan kewajiban untuk di konsolidasikan ke entitas akuntansi lain.

3.4.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal periode 29 Desember 2023 dan 2022 Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.466.180.826,00** dan **Rp.17.433.079.887,00**.

BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir Tahun 2023 hasil *Audited* sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun yang berakhir 31 Desember 2023, memuat kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hajimena, Januari 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung



YURNALIS, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690710 199003 1 006